

## **BAB II**

### **SITUASI DAN KONDISI NASIONAL SEBELUM PERISTIWA 30 SEPTEMBER 1965**

#### **A. Situasi dan Kondisi Nasional Sebelum Peristiwa 30 September 1965**

##### **1. Politik**

Kemacetan sistim parlementer di tahun 1957 dan berbagai gangguan keamanan dalam negeri, dimanfaatkan militer dengan mengumumkan keadaan darurat perang, yang memungkinkan para perwira tentara mendapatkan peran yang lebih besar dalam fungsi politik, administrasi, dan ekonomi. Undang-undang keadaan bahaya/SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) 1957 menambah wewenang militer. Untuk memperoleh dasar pembenaran terhadap peranan militer dalam fungsi-fungsi tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (Mayjen Abdul Harris Nasution) merumuskan sebuah konsep yang bernama “Jalan Tengah”, yang menetapkan bahwa pihak tentara tidak akan mencari kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan, namun juga tidak akan bersikap acuh tak acuh terhadap politik. Militer khususnya Angkatan Darat, tampil makin kuat melalui Konsep Dwifungsi yang sejak tahun 1958 mengintensifkan keterlibatannya tidak saja pada bidang pertahanan negara tetapi juga dalam administrasi sipil (pemerintahan) dan perekonomian.

Angkatan Darat memaparkan kelemahan-kelemahan sistim parlementer yang tidak mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan menuntut suatu struktur pemerintahan yang memberi kesempatan kepada Angkatan Darat mendapatkan kedudukan sentral. Didorong pula oleh

kegagalan Dewan Konstituante menyusun konstitusi baru, maka bersama-sama dengan Presiden, Angkatan Darat merintis jalan untuk kembali ke UUD 1945.

Tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang kemudian disebut sebagai Konsepsi Presiden yaitu pertama, menyarankan dibentuk Kabinet Gotong Royong yang mewakili semua partai politik, secara khusus adalah empat partai pemenang pemilu 1955 yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dengan demikian pemerintahan berdiri di atas empat kaki (Kabinet Empat Kaki) yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI serta mungkin dibantu oleh wakil-wakil dari partai kecil lainnya. Kabinet ini akan mampu menjalankan kebijaksanaan politik nasional yang dapat diterima dan meningkatkan kerukunan persatuan nasional. Kedua, pembentukan suatu Dewan Nasional di bawah kepemimpinannya yang diharapkan dapat menyusun garis-garis besar politik nasional. Dewan ini bukanlah suatu badan perwakilan partai-partai, melainkan perwakilan dari golongan fungsional, seperti buruh, tani, cendekiawan, pengusaha nasional, angkatan bersenjata, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan wakil-wakil daerah. Dewan Nasional adalah pencerminan dari masyarakat secara keseluruhan, dan Kabinet Empat Kaki merupakan pencerminan dari parlemen, sehingga keduanya akan dapat mengambil keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yuli Hananto, *Bermuka Dua: Kebijakan Soeharto terhadap Soekarno beserta Keluarganya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005, hlm. 53-54.

Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menempatkan Presiden Soekarno tidak lagi hanya sebagai kepala negara melainkan juga sebagai kepala pemerintahan. Parlemen hasil Pemilu 1955 (MPR dan DPR) serta Dewan Konstituante dibubarkan dan diganti dengan MPR Sementara (MPRS) dan DPR Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya dipilih oleh presiden. Dengan demikian, kebijakan yang sesuai keinginan Soekarno dapat dilaksanakan tanpa gangguan oposisi dan prosedur-prosedur parlementer. Hal ini merupakan langkah awal dari pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin.<sup>2</sup>

Tanggal 17 Agustus 1959 dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Dalam pidato itu, Soekarno menguraikan ideologi dari Demokrasi Terpimpin yang dikenal dengan nama Manifesto Politik (Manipol). Soekarno menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan *retooling* lembaga-lembaga dan organisasi negara demi pelaksanaan revolusi nasional yang berkesinambungan. Pada intinya, Manipol menekankan bahwa Revolusi Indonesia belum selesai sehingga perlu menggalang kekuatan-kekuatan revolusioner yang dimiliki oleh bangsa ini. Pada awal tahun 1960, Soekarno menambahkan Manipol dengan istilah USDEK (UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional). Artinya

---

<sup>2</sup> Beise, Kerstein, *Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G 30 S?*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004, hlm. 12.

pelaksanaan dari Manifesto Politik Indonesia yang berintikan semangat revolusi harus dilandaskan pada UUD 1945, jiwa Sosialisme gaya Indonesia, demokrasi dengan kepemimpinan Soekarno, pembangunan ekonomi di bawah Soekarno, dan kepribadian Indonesia (anti kebarat-baratan). Manipol USDEK ini kemudian ditetapkan menjadi GBHN oleh MPRS.<sup>3</sup>

Pada awal tahun 1960, dalam usaha untuk menggalang persatuan, Soekarno memperkenalkan pemikiran baru untuk melengkapi doktrin revolusinya. Doktrin itu terkenal dengan sebutan Nasakom. Nasakom merupakan lambang persatuan atas pencerminan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nasakom adalah jiwa dari kepribadian masyarakat yang berisi tiga kekuatan, yaitu golongan nasionalis, agama, dan komunis. Artinya ketiga golongan tersebut akan bersama-sama berperan dalam pemerintahan Soekarno sehingga menghasilkan suatu sistem yang didasarkan pada koalisi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Pandangan Soekarno pada intinya adalah menghendaki keutuhan bangsa melalui persatuan aliran-aliran politik masyarakat Indonesia demi menggalang kekuatan revolusioner.<sup>4</sup>

Dengan adanya Demokrasi Terpimpin dan konsep persatuan Nasakom, PKI yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam pemerintahan karena masih ditolak oleh banyak kalangan akibat pemberontakan di

---

<sup>3</sup> Yuli Hananto, *op.cit.*, hlm. 55-56.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

Madiun tahun 1948 walaupun dalam pemilu 1955 menempati posisi ke empat dalam peraihan suara, untuk pertama kalinya diterima dalam pemerintahan bahkan diikutsertakan dalam kabinet. Tokoh PKI Njoto diangkat sebagai Menteri Negara, Ketua PKI Dipa Nusantara Aidit diangkat sebagai Menteri/Wakil Ketua MPRS, dan Wakil Ketua PKI M. H. Lukman diangkat sebagai Menteri/Wakil Ketua DPRGR pada tahun 1962. dibawah pimpinan D. N. Aidit, PKI menguatkan posisinya dalam mencapai kekuasaan secara legal.<sup>5</sup>

Menguatnya kedudukan PKI dalam pemerintahan juga dipengaruhi oleh pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. pembubaran kedua partai ini terkait dengan keterlibatan beberapa tokoh partai tersebut dalam pemberontakan PRRI-Permesta, seperti Mohammad Natsir, Soemitro Dojohadikoesoemo, Burhanudin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara. Dalam peristiwa PRRI-Permesta ini, AS melalui CIA ikut serta menyokong dengan harapan dapat menggulingkan kekuasaan Soekarno. Keterlibatan CIA dalam PRRI-Permesta terbukti saat ALRI berhasil menembak jatuh pesawat pembom yang dikemudikan Allen Pope, warga negara AS, di Teluk Ambon pada 18 Mei 1958. peristiwa ini tidak saja mengejutkan publik AS, tetapi juga masyarakat internasional. Apalagi Allen Pope mengaku bekerja untuk CIA

---

<sup>5</sup> Departemen Penerangan RI, *Gelora Konfrontasi Mengganjang Malaysia*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1964, hlm. 73-77.

dalam rangka memasok keperluan obat-obatan untuk kaum pemberontak PRRI-Permesta.<sup>6</sup>

Pada tahun 1961, penyelesaian masalah Irian Barat dengan pihak Belanda semakin suram. Tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta diadakan rapat umum yang diikuti oleh jutaan rakyat, presiden, para menteri, dan perwakilan negara asing. Dalam rapat umum tersebut, Presiden Soekarno menyerukan komando kepada seluruh rakyat untuk: (1) menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, (2) mengibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, dan (3) mempersiapkan diri untuk mobilisasi umum. Komando presiden yang kemudian disebut Trikora (Tiga Komando Rakyat) ini merupakan anti klimaks bagi perjuangan pembebasan Irian Barat.<sup>7</sup>

Tahun 1962 menjadi tahun perjuangan pembebasan Irian Barat. Selain usaha diplomasi dan membawa masalah Irian Barat dalam pembicaraan internasional, pemerintah juga mengambil langkah militer. Langkah pertama setelah seruan Trikora, yaitu pembentukan Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat. Presiden Soekarno tanggal 9 Januari 1962 mengangkat Brigjen Soeharto menjadi Panglima Mandala berkedudukan di Makassar. Pada tanggal 16 Januari 1962 terjadilah

---

<sup>6</sup> Sulastomo, *Di Balik Tragedi 1965*, Jakarta: Yayasan Pustaka Ummat, 2006, hlm. 13-14.

<sup>7</sup> Rosihan Anwar, *Sukarno-Tentara-PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 83.

insiden Aru, kapal ALRI yang sedang berpatroli di perairan Kepulauan Aru diserang tiba-tiba oleh kesatuan Angkatan Laut Belanda. Di antara awak kapal RI Macan Tutul terdapat Deputi KSAL Komodor Jos Soedarso dan nahkoda Wiratno yang gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu, presiden marah dan ingin agar AURI melakukan serangan balasan terhadap Belanda di Irian Barat, tetapi Kepala Staf AU (KSAU) Suryadarma mengemukakan AURI tidak mempunyai cukup pilot untuk mengemudikan pesawat pembom jarak jauh dan tidak memiliki cukup amunisi. Hal ini membuat presiden pada tanggal 22 Januari 1962 melantik KSAU baru yaitu Laksda Omar Dhani dan memberhentikan dengan hormat Suryadarma selaku KSAU. Terhadap kekuatan Angkatan Darat, presiden juga merasa perlu mengangkat KSAD baru yang dianggapnya lebih loyal. Tanggal 23 Juni 1962, Presiden Soekarno melantik Mayjen Ahmad Yani sebagai KSAD. Jenderal Nasution dijadikan Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) yang hanya melakukan fungsi koordinasi belaka terhadap keempat angkatan yaitu AD, AL, AU, AK.<sup>8</sup>

Dalam masalah Irian Barat, AS mendukung setiap usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda untuk menghindari konflik terbuka. Salah satu bukti AS ingin berperan sebagai perantara dalam sengketa Irian Barat tampak pada tindakan AS yang memfasilitasi pelaksanaan perundingan Indonesia-Belanda di Washington pada tanggal 20 Maret 1962 dengan disaksikan pihak ketiga yaitu AS. Indonesia

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 91-212.

mengirimkan wakilnya MR. Sudjarwo Tjondronegoro, Adam Malik, Mr. Zairin Zain, dan Sukardjo Wirjopranoto untuk menghadapi delegasi Belanda yang terdiri dari Dr. Van Royen dan Schuurman. Dari perundingan itu, diterimalah usul dari Ellsworth Bunker, bekas Duta Besar AS di India, yang bertindak sebagai penengah dalam perundingan Indonesia-Belanda. Dari perundingan itu, diterimalah usul dari Ellsworth Bunker, bekas Duta Besar AS di India, yang bertindak sebagai penengah dalam perundingan Indonesia-Belanda. Serangkaian pembicaraan dilakukan di Washington antara delegasi Indonesia dan Belanda yang pada akhirnya menghasilkan rencana kompromistis yang lebih dikenal sebagai Rencana Bunker.<sup>9</sup> Dalam rangka pelaksanaan kepercayaan yang telah diberikan kedua belah pihak yang bersengketa, PBB melakukan kembali perundingan pada tanggal 31 juli 1962, dimana salah satu butir kesepakatannya berisi rencana penyerahan administrasi pemerintah Irian Barat ke Indonesia melalui suatu badan pemerintah PBB dan menjamin adanya hak menentukan pendapat rakyat Irian Barat.<sup>10</sup> Pembentukan badan administrasi di Irian Barat tersebut dinamakan UNTEA (*United Nations Temporary Executif Authority*).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Dinas Sejarah TNI AD, *Peranan TNI AD dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bandung: Dinas Sejarah TNI AD, 1985, hlm. 144.

<sup>10</sup> The Liang Gie dan F. Soegeng Istanto, *Pertumbuhan Propinsi Irian Barat*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 1968, hlm. 35.

<sup>11</sup> Hayaruddin Siagian, *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Ilmu dan Budaya, 1989, hlm. 16.



Intinya Belanda akan menyerahkan kedaulatan atas Irian Barat kepada sebuah badan internasional yang akan memerintah selama masa peralihan sebelum nantinya resmi diserahkan pada Indonesia. Tanggal 1 Oktober 1962 penjajahan Belanda di Irian Barat berakhir, kekuasaan di sana dipegang oleh Badan PBB UNTEA sampai 1 Mei 1963. Sikap Australia yang tidak lagi mendukung Belanda ini secara tegas dinyatakan pemerintah Australia setelah diadakan sidang kabinet. Australian kini bisa menerima pemerintahan Indonesia di Irian Barat dan Australia mengakui konsep kepentingan vital kini tidak berlaku. Dengan tersingkirnya masalah Irian Barat sebagai sumber perselisihan, hubungan kedua negara kembali membaik.

Setelah masalah Irian Barat selesai, tahun 1963 dimulailah konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia merupakan kebijakan luar negeri Presiden Soekarno untuk melawan kekuatan Nekolim (*Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme*). Presiden merasa perlu meneruskan perjuangan melawan kekuatan-kekuatan asing yang ingin memunculkan kembali imperialisme dan kolonialisme di dunia. Untuk itu diperlukan kekuatan revolusioner dengan poros Nasakom, salah satunya melalui perubahan struktur pemerintahan dari pusat hingga ke daerah agar berunsur Nasakom, dan pemulihan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Soekarno tanggal 18 Februari merumuskan Panca Program Front Nasional sebagai berikut.

- (1) konsolidasi kemenangan yang sudah tercapai di bidang keamanan dan Irian Barat,
- (2) menanggulangi kesulitan ekonomi

dengan mengutamakan kenaikan produksi, (3) meneruskan perjuangan anti imperialisme dan anti neo kolonialisme dengan mempergunakan kegotongroyongan revolusioner dengan poros Nasakom, (4) mengamalkan indoktrinasi wejangan-wejangan presiden, dan (5) *retooling* aparaturnegara, termasuk bidang pemerintahan dari pusat sampai ke daerah.<sup>12</sup>

Terkait dengan kebijakan tersebut, maka presiden menyerukan pula perlunya mengganyang mereka yang anti Nasakom. PKI melalui Aidit menyatakan dukungan antusias terhadap kebijakan presiden tersebut, mengganyang mereka yang anti Nasakom. Bagi PKI hal ini berarti mengganyang tentara.

Kebijakan anti Nekolim yang didukung dengan kesatuan Nasakom membuat presiden menyatakan keluar dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan menginstruksikan pembentukan Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*). Presiden juga menentang gagasan pembentukan negara Malaysia yang dianggap sebagai suatu bentuk neo kolonialisme dan imperialisme. Meskipun demikian, presiden menyetujui pembentukan konfederasi negara-negara Asia Tenggara yang berbangsa Melayu, terdiri dari Indonesia, Filipina, dan Malaya. Presiden keberatan mengenai gagasan pembentukan Malaysia yang akan dilaksanakan oleh Inggris dengan bantuan Tengku Abdul Rachman yang pada waktu itu menjadi pemimpin Malaya. Federasi yang meliputi Malaya meliputi Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah diusulkan oleh dia didepan para

---

<sup>12</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 221.

wartawan yang tergabung dalam *foreign journalists association* pada tanggal 27 Mei 1961.<sup>13</sup>

Seruan Ganyang Malaysia menimbulkan demonstrasi dari pemuda dan masa rakyat terhadap Kedutaan Besar Inggris dan Malaya. Salah satunya yang terjadi tanggal 16 September 1963 setelah tersiar kabar pembentukan Malaysia diproklamasikan oleh Tengku Abdul Rachman. Para demonstran menurunkan bendera dan membakar gedung kedutaan Inggris Karena tidak diterima oleh Duta Besar Inggris Andrew Gilchrist.

Memasuki tahun 1964 suhu politik nasional semakin memanas. AS yang khawatir terhadap pengaruh komunis di Indonesia, mencoba mengusahakan jalan damai. Tetapi, pelaksanaan diplomasi damai ini tidak lepas dari oposisi dan kecaman PKI, sehingga mengalami kegagalan. Atas kegagalan tersebut, Soebandrio yang merupakan tangan kanan Presiden Soekarno menyatakan bahwa konfrontasi dengan Malaysia akan tetap berlangsung dan bahkan harus diintensifkan.<sup>14</sup>

Indonesia semakin gencar melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, bahkan Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rachman mempertimbangkan untuk meminta campur tangan PBB guna mengatasi apa yang disebutnya “agresi” Indonesia yang terbuka terhadap Malaysia.

---

<sup>13</sup> Hidayat Mukmin, *TNI dalam Politik Luar Negeri Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia Malaysia*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1991, hlm. 35.

<sup>14</sup> Liefer, Michael, *Indonesia's Foreign Policy*, terjemahan a. Ramlan Surbakti. *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 46.

Presiden mengeluarkan komando pendaftaran sukarelawan bagi pemuda-pemudi Indonesia, dengan harapan dapat menanggulangi ketahanan revolusi Indonesia dan meninggikan kesiapsiagaan rakyat. Pihak Inggris semakin tidak menyukai tindakan Indonesia ini, kemudian menyita dua kapal haji Indonesia “Tampomas” dan “Ambulombo” yang sedang berada di Hongkong. Hal ini memunculkan demonstrasi yang menuntut agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris. Awal tahun 1964, majalah AS *Life* mengeluarkan tajuk yang berjudul *Let us move Soekarno now* (mari sekarang kita selesaikan Soekarno) yang isinya melukiskan kejelekan-kejelekan Indonesia dan kebijakan-kebijakan Soekarno yang semakin anti barat. Dengan demikian sudah tampak upaya-upaya Barat (AS dan Inggris) yang tidak menyenangi Soekarno untuk menyingkirkan Soekarno sebagai Presiden.

Tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang ditujukan pada 21 juta sukarelawan yang telah terdaftar dan rakyat seluruhnya.

Kami Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi dalam rangka perjuangan konfrontasi melawan proyek neo-kolonialis Malaysia yang nyata membahayakan revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak Malaysia untuk mencapai penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan Asia, dan nyata pula bahwa ikhtiar itu ditentang dan dijawab dengan penghinaan dan permusuhan, seperti umpamanya dengan mobilitasi umum yang dilakukan oleh Tengku Abdul Rachman, maka kami perintahkan :

Pertama: perhebat ketahanan Revolusi Indonesia;

Kedua; Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan membubarkan Negara Malaysia.<sup>15</sup>

Seiring dengan gencarnya aksi ganyang Malaysia, kekuatan PKI semakin menonjol. Aksi-aksi kaum tani dalam rangka *landreform* semakin gencar dilakukan. Bagi PKI aksi macam ini sebagai hal yang adil dan patriotik karena bertujuan melaksanakan undang-undang negara dan menguntungkan pemerintah serta rakyat diluar kaum tani, sebab aksi-aksi tersebut dapat membantu memecahkan masalah pangan. Bahkan pada bulan juli 1964, Aidit memberikan pernyataan mengenai hasil-hasil riset PKI yang berhubungan dengan agraria. Menurutnya musuh petani ada 7 setan, yaitu tuan tanah jahat, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, penguasa jahat, kapitalis birokrat, dan bandit-bandit desa.<sup>16</sup> Aksi mengganyang setan-setan desa ini menimbulkan rasa dendam di kalangan masyarakat yang sebagian besar merupakan santri. Usaha menghancurkan pengaruh para ulama di desa-desa dilakukan oleh PKI untuk mendapat dukungan dari angkatan muda non-santri dan sekaligus mematahkan ormas dan partai-partai Islam.<sup>17</sup> Kegiatan PKI terkait dengan pertanian dipusatkan pada gerakan tani diseluruh Indonesia. Menurut PKI, di Indonesia terdapat empat ciri sisa feodalisme yang berat, yaitu (1)

---

<sup>15</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 305.

<sup>16</sup> A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid: 6 Masa Kebangkitan Orde Baru*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1988, hlm. 103.

<sup>17</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 367.

monopoli tuan tanah atas tanah, (2) sewa tanah dalam wujud hasil bumi, (3) sewa tanah dalam bentuk kerja di tanah tuan tanah, dan (4) utang-utang yang mencekik leher kaum tani.

PKI juga mulai memperoleh kesempatan dalam menanamkan pengaruhnya di pemerintahan daerah. Adanya Front Nasional di daerah, maka Catur Tunggal yang merupakan pimpinan di Daerah Tingkat I (Provinsi) dan terdiri dari empat unsur, yaitu gubernur, panglima Angkatan Darat/Laut di daerah, Kepala Komisariat Polisi, dan Kepala Kejaksaan diubah menjadi Panca Tunggal, didalamnya dimasukkan wakil Front Nasional di daerah. Dengan harapan dapat dicapai efek politik dengan menunjukkan wakil rakyat diikutsertakan dalam pimpinan pemerintah daerah. Front Nasional kenyataannya sudah diinfiltrasi oleh PKI atau setidaknya berorientasi ke PKI, ini berarti terwujudnya gagasan Nasakom di daerah. PKI mempunyai kesempatan aktif dan legal ikut serta dalam pemerintahan daerah.

Pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan. Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena Malaysia dijadikan anggota Dewan Keamanan PBB. Di dalam negeri, presiden mengeluarkan larangan terhadap Partai Murba berikut organisasi massa yang bernaung di bawahnya, karena Partai Murba telah menentang aksi-aksi sepihak kaum tani. PKI rupanya tidak senang dengan Partai Murba dan telah berhasil mempengaruhi presiden untuk membubarkan Partai

Murba yang tidak revolusioner dan progresif. Partai Murba pada akhirnya dibubarkan tanggal 21 September 1965 melalui Keppres nomor 291/1965.

PKI semakin berani menanamkan pengaruhnya, hal ini terbukti ketika Ketua PKI D. N. Aidit mengusulkan kepada presiden agar kaum buruh dan tani yang terorganisasi dalam ormas-ormas revolusioner dipersenjatai sebagai jawaban atas tindakan imperialisme Inggris yang terus-menerus memperkuat jumlah tentaranya di daerah Malaysia. Terhadap usulan ini, presiden merasa perlu mempertimbangkannya dan membicarakannya dengan militer, khususnya Angkatan Darat yang tampaknya kurang setuju dengan gagasan ini. Bagi Angkatan Darat, mempersenjatai kaum buruh dan tani jelas akan menguntungkan PKI. Menurut Aidit, jumlah kaum buruh yang perlu dipersenjatai ada 5 juta sedangkan kaum tani ada 10 juta. Indonesia juga merencanakan akan meminta bantuan dari RRC jika diserang oleh imperialisme Inggris. RRC bahkan telah memasok lebih dari 37.000 pucuk senjata ringan untuk membantu pembentukan Angkatan ke V.<sup>18</sup>

Kedekatan Indonesia dengan RRC terlihat dengan adanya kebijakan poros Jakarta-Beijing-Pyongyang-Hanoi. Termasuk ide Angkatan ke V sebenarnya datang dari perdana Menteri RRC Chou En Lai agar Indonesia meniru RRC yang memiliki kekuatan milisi rakyat dalam Angkatan Bersenjata. Presiden Soekarno menganjurkan agar dalam menyusun pertahanan nasional digunakan manfaat kegotongroyongan yang menjadi

---

<sup>18</sup> Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 103.

corak jiwa bangsa Indonesia. Angkatan Bersenjata RI harus menjadi Angkatan Bersenjata Rakyat dan Angkatan Bersenjata Gotong Royong. Untuk itu, diperlukan Angkatan ke V yang berisi sukarelawan-sukarelawan yang telah dimiliki Indonesia agar ABRI menjadi suatu Angkatan Bersenjata Rakyat.

Berpalingnya Soekarno dari Negara-negara Barat, meninggalkan kebijaksanaan non blok, dan semakin dekat dengan komunis dan PKI, membuat AS khawatir kalau Indonesia menjadi satu buah batu lagi yang jatuh dalam teori domino.<sup>19</sup> Teori domino hendak menggambarkan bahwa apabila satu negara jatuh dalam paham komunis, maka akan mempengaruhi negara tetangganya untuk turut jatuh pula dalam paham Komunis. Ketika itu Vietnam telah dikuasai oleh kekuatan Komunis, sehingga dikhawatirkan Indonesia dapat jatuh pula dalam kekuasaan Komunis dan akan membuat negara-negara disekitarnya ikut jatuh dalam kekuasaan Komunis. Sejak bulan Mei 1965, beredarlah isu mengenai Dokumen Gilchrist dan Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap presiden. Lepas dari asli atau tidaknya, Dokumen Gilchrist berupa sebuah *copy* radiogram dari Dubes Inggris di Jakarta yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Inggris. Dokumen ini diketik pada sebuah kop surat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Dokumen ini ditemukan di rumah Bill Palmer, seorang pengusaha film AS, ketika rumahnya digrebek oleh massa pemuda. Dokumen ini kemudian diterima

---

<sup>19</sup> Beise, Kerstein, *op.cit.*, hlm. 15.



oleh Wakil Perdana Menteri I dr. Soebandrio lewat pos. Isinya seolah-olah ada komitmen antara AS dengan Inggris, untuk menjalin kerja sama dengan “*our local army friends*” yang kemudian diidentikan dengan Dewan Jenderal.<sup>20</sup>

Isu-isu ini cukup memanaskan situasi politik saat itu. Bahkan PKI berani menyatakan bahwa “Ibu Pertiwi sedang hamil tua”, sang bidan sedang bersiap-siap menyelamatkan kelahiran sang bayi. Bayi itu adalah suatu kekuasaan politik yang sudah ditentukan dalam Manipol, yaitu kekuasaan gotong royong yang berporoskan Nasakom, bersaka guru buruh dan tani.<sup>21</sup> Situasi panas ini membuat AS semakin khawatir, kepentingan AS di Asia Tenggara dan khususnya Indonesia akan terganggu jika Indonesia jatuh ke tangan komunis. Puncak dari situasi panas ini terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 ketika jenderal-jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh gerombolan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Kesempatan ini kemudian digunakan AS untuk mendukung kekuatan militer (Angkatan Darat) yang melakukan pemberantasan terhadap kekuatan Komunis Indonesia yang telah dituduh sebagai dalang dari Gerakan 30 September.

Dengan demikian sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, muncul segitiga kekuasaan yaitu Soekarno, Tentara (Angkatan Darat), dan PKI. Perkembangan politik dalam kurun waktu 1961-1965 bermula dari

---

<sup>20</sup> Sulastomo, *op.cit.*, hlm. 70-71.

<sup>21</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 374.

militer yang bekerjasama dengan Soekarno dalam memperkecil peran partai politik sembari memperkenalkan konsep Golongan Karya (Golkar), memberlakukan kembali UUD 1945, dan membawa Indonesia ke sistim otoriter Demokrasi Terpimpin. Menyadari kekuatan militer dalam politik semakin besar, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom untuk memperkuat partai politik sebagai pengimbang menghadapi tentara. Dengan konsep Nasakom, diharapkan PNI (Nas), NU (A), dan PKI (Kom) secara bersama dapat dimanfaatkan menghadapi tentara, tetapi dalam kenyataannya hanya PKI yang siap. Kekuatan PNI terpecah dan NU enggan bekerja sama dengan PKI. PKI yang sejak pemberontakan Madiun 1948 menjadi musuh TNI, tentu saja memerlukan perlindungan Soekarno, sedangkan Soekarno memerlukan PKI sebagai pengimbang untuk menghadapi tentara.<sup>22</sup>

Segitiga kekuasaan ini pada akhirnya saling berbenturan sampai salah satu dari mereka muncul sebagai pemenang/juara tunggal, yang akan menyebabkan tidak adanya lagi perimbangan politik dan terwujudlah suatu kekuasaan yang sifatnya lebih monolitik. Setelah Peristiwa 30 September 1965, maka kekuatan PKI lumpuh total dan yang tinggal hanya kekuatan Soekarno melawan tentara. Soekarno berhasil diturunkan secara perlahan-lahan dari kedudukannya sebagai presiden, sehingga yang tersisa hanya kekuatan tunggal, yaitu kekuatan tentara dengan Soeharto sebagai pemimpinnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. xi.

Selama berlangsungnya sistim ketatanegaraan Demokrasi Terpimpin, para pengamat politik telah banyak memperoleh petunjuk, bahwa kebijakan pemerintah Indonesia pada periode tersebut berangsur-angsur bergeser ke kiri. Secara sadar ataupun tidak sadar, walaupun Presiden Soekarno yang menjadi pimpinan, namun dalam bayangannya nampak tangan-tangan PKI yang ikut serta mengemudikan pemerintahan. Pertentangan golongan komunis terhadap golongan liberalis dalam konteks konfrontasi terhadap Federasi Malaysia semakin jelas. Beberapa berita dalam Surat Kabar Harian Rakjat yang merupakan milik PKI, secara implisit mendorong pemerintah Indonesia agar meneruskan politik “Pengganyangan Malaysia” secara hebat. Aidit yang menjabat sebagai ketua umum PKI bahkan mengancam jika pemerintah indonesia menyelesaikan masalah Malaysia secara kompromistis.<sup>23</sup>

## 2. Ekonomi

Setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, program kabinet selalu berkuat pada tiga hal, yaitu: (1) sandang pangan, (2) pemulihan keamanan, dan (3) perjuangan Irian Barat. Demikian juga program Kabinet Djuanda, dalam laporannya di depan sidang parlemen gotong royong tahun 1961. Dalam laporannya itu, ekonomi dan keuangan tidak

---

<sup>23</sup> Mohammad Hatta dan Ide Anak Agung Gde Agung, *Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung: Menjunjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Diktatur*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987, hlm. 45.

terlalu suram. Neraca pembayaran akhir tahun 1960 menghasilkan surplus Rp 4 milyar.<sup>24</sup>

Memasuki tahun 1962, perjuangan pembebasan Irian Barat berdampak dalam bidang ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok dalam masyarakat melambung, misalnya telur yang sebelumnya Rp 4,00 per biji menjadi Rp 8,00; terigu dari Rp 40,00 sekilo menjadi Rp 100,00; harga beras antara Rp 60,00 sampai Rp 70,00 per liter; termasuk harga rokok juga ikut naik. Selain harga yang melambung tinggi, barang-barang kebutuhan pokok itu sangat sulit didapat. Sabun, minyak, garam, gula, dan beras langka dipasaran, sehingga sering kali rakyat harus antri dalam operasi pasar. Keadaan perekonomian di tahun 1962 tidak sebaik tahun 1961, tekanan inflasi bertambah lagi. Kedudukan devisa minus 0,1 milyar rupiah, sehingga susah mengimpor barang. Peredaran uang mencapai Rp 70 milyar. Jumlah anggaran tahun 1962 sekitar Rp 98 milyar dengan rancangan defisit antara Rp 34 milyar dan Rp 40 milyar. Utang yang harus dibayar sebanyak Rp 12,4 milyar. Belum lagi pengeluaran untuk operasi Irian Barat. Keadaan devisa menjadi semakin suram dan kering. Tingkat harga paling sedikit sudah dua kali lipat dari beberapa waktu lalu. Awal tahun 1962, pemerintah mendapat *grant* beras dari AS dalam rangka *Surplus Agriculture Commodity (SAC) Agreement*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982, hlm. 150-151.

<sup>25</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 133.

Untuk mengatasi permasalahan perekonomian, pada tanggal 21 April 1962, presiden mengumumkan susunan staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE). Sebagai panglima besarnya dipegang oleh presiden sendiri. Semenjak upaya perjuangan merebut Irian Barat, staf-staf kepresidenan dibentuk dengan gaya militer, termasuk staf kepresidenan untuk pemulihan ekonomi. Para pejabat yang berasal dari kalangan sipil memperoleh pangkat militer titular atau dimiliterisasikan. Pakaian seragam militer tidaklah menjamin kesulitan ekonomi bisa segera diatasi. Perjuangan Irian Barat meminta pengorbanan dari rakyat berupa kesulitan ekonomi. KOTOE berisi perintah untuk memutuskan semua hubungan perekonomian dengan daerah-daerah yang menamakan diri mereka sebagai bagian dari Federasi Malaysia, terutama Malaya dan Singapura, serta “dedolarisasi” di Kepulauan Riau. Dibandingkan konfrontasi di bidang politik dan ekonomi, konfrontasi dalam bidang militer bersifat lebih terbatas, karena tidak dilakukan penempatan kesatuan secara besar-besaran diperbatasan, hanya penempatan pasukan reguler secara terbatas. Justru yang aktif dalam aksi pengganyangan ini adalah para sukarelawan yang pada saat dicetuskannya Dwi Komando Rakyat atau Dwikora mencapai jumlah 2,1 juta orang.<sup>26</sup> Jumlah sukarelawan sebesar itulah yang diinginkan PKI untuk dipersenjatai sebagai angkatan ke V.

Dalam kunjungan Ketua Gabungan Kepala Staf AS Jenderal Maxwell D. Taylor, TNI mengusulkan agar AS bersedia memberi bantuan

---

<sup>26</sup> Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 97.

keuangan kepada Indonesia guna melaksanakan proyek-proyek pembangunan, tetapi bantuan itu disalurkan melalui tentara dan pelaksanaan proyek dikerjakan oleh tentara pula. Hal ini didasari kondisi Angkatan Darat yang memprihatinkan khususnya pasca perebutan Irian Barat, anggaran belanja Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk tahun 1963 dipotong 30 persen agar defisit menjadi sekecil mungkin. Tahun 1962, anggaran sebanyak Rp 20 milyar saja masih kurang, karena yang diperlukan minimum Rp 27 milyar, dengan jumlah tentara Angkatan Darat sebanyak Rp 350.000. Belanja rutin dan gaji diperlukan Rp 12,4 milyar, belum biaya perawatan alat-alat dan pembangunan asrama. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilaksanakan program demobilisasi, namun program tersebut dapat juga menimbulkan ketidakpuasan apabila tentara yang didemobilisasi tidak dapat ditampung dan mendapat pekerjaan dalam masyarakat. Tentara yang sebelumnya mengemban tugas operasional dalam perjuangan merebut Irian Barat dan bersedia dimarkaskan di gubuk-gubuk, sekarang dimasa damai harus diasramakan. Oleh karena itu, muncul pula pemikiran untuk mengikutsertakan tentara dalam proyek-proyek nasional seperti penanaman kembali (replanting), penghijauan kembali (reboisasi), menggali saluran, membuat waduk, dan perbaikan alat-alat produksi lainnya.

Jenderal Taylor antusias dengan konsep tersebut. Pemerintah AS, Kennedy, juga setuju dengan gagasan untuk menyalurkan bantuan ekonomi dan keuangan AS melalui TNI. Bantuan ini nantinya disalurkan

melalui Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang mengelolanya untuk proyek perbaikan jalan, jembatan, dan proyek sipil lainnya. Sekber Golkar dibentuk atas ide Nasution yang didukung oleh presiden.<sup>27</sup> Dengan demikian masalah demobilisasi tentara dapat ditampung dengan sebaik-baiknya dengan tugas melaksanakan proyek pembangunan atas bantuan keuangan AS. Ini menjadi awal dukungan AS terhadap kekuatan militer khususnya Angkatan Darat yang nantinya muncul sebagai kekuatan tunggal pasca peristiwa 30 September 1965.

KOTOE yang telah dibentuk presiden belum menampakkan hasil bagi pemulihan perekonomian. Pada bulan Maret 1963, presiden menunjuk Panitia 13 untuk merumuskan garis-garis kebijakan pokok (*Basic Strategic Principles*) untuk mengatasi masalah ekonomi dan keuangan negara. Hasil kerja Panitia 13 berkisar pada pandangan Djuanda yaitu perlunya tindakan devaluasi (1 dollar US dinilai Rp 700,00 untuk impor dan Rp 350,00 untuk ekspor), gaji pegawai negeri dinaikkan dua kali lipat, sedangkan harga barang dalam negeri dinaikkan sampai lima kali lipat. Sehingga diharapkan akan memperoleh surplus Rp 50 milyar, tetapi usulan Djuanda ini ditolak oleh presiden.

Presiden lebih menereima usulan dari dr. Soebandrio yang dinamakan Manifes Ekonomi.

Ada tiga pokok pikiran dari Manifes Ekonomi, yaitu:

---

<sup>27</sup> Hayaruddin Siagian, *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Ilmu dan Budaya, 1989, hlm. 37.

1. Perlunya lebih mengakui kedudukan dan peranan swasta dalam rangka kegiatan ekonomi Indonesia;
2. perlu adanya debirokratisasi;
3. perlu adanya desentralisasi dalam manajemen.<sup>28</sup>

Manifes Ekonomi ini diumumkan presiden dengan istilah Deklarasi Ekonomi (Dekon) tanggal 28 Maret 1963.

Kondisi perekonomian semakin bertambah sulit ketika pemerintah melaksanakan kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia. Gelombang demonstrasi juga mulai menyerang Kedutaan Besar Amerika Serikat, karena ketika masalah Indonesia-Malaysia dibicarakan di PBB, Amerika Serikat lebih mendukung Federasi Malaysia.<sup>29</sup> Kaum buruh mengambil alih perusahaan-perusahaan Inggris yaitu *Unilever* di Jakarta, *PT Lands* di Subang, *PT Shell Indonesia*, termasuk juga pabrik rokok *British American Tobacco* (BAT) di Cirebon.<sup>30</sup> Tindakan ini sebagai protes dalam rangka Ganyang Malaysia. Bahkan di tahun 1964, Presiden Soekarno berkata “*Go to hell with your aid*” ketika mengomentari soal bantuan AS. Ucapan presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan *Congress* AS dan menyerukan agar menghentikan saja segala bantuan pada Indonesia. Sebenarnya berhenti atau tidak bantuan tersebut tidak banyak berarti, sebab sejak konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia tidak menerima

---

<sup>28</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 232.

<sup>29</sup> Frans S Fernandes, *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia, Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga Penelitian Tenaga Kependidikan, 1988, hlm. 171.

<sup>30</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 265.



banyak dari AS yaitu kurang dari 1 juta dollar AS setahun guna pembasmian Malaria. Dalam kenyataannya, pemerintah AS tidak menanggapi serius ucapan presiden tersebut, sebab AS tetap bersedia memberikan bantuan melalui program AID (*Agency for International Development*) berupa bantuan teknis untuk kelompok sipil, polisi, dan para perwira yang terlibat dalam aktivitas sipil, dan pemberantasan malaria.

Situasi politik yang panas menjelang Peristiwa 30 September 1965 membuat pemerintah mengesampingkan bidang ekonomi. Tahun 1965 inflasi mencapai 600 persen, pemerintah terpaksa melakukan *sanering* dengan memotong nilai uang.<sup>31</sup> Kondisi perekonomian yang buruk ini terjadi dikalangan rakyat bawah, sementara pemerintah masih saja melakukan berbagai pemborosan bahkan korupsi juga merajalela. Jenderal A. H. Nasution dalam kedudukannya selaku Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) mengumumkan penemuan adanya manipulasi dan penyelewengan dalam lingkungan perusahaan negara. Hal ini berhasil diketahui melalui Operasi Budhi yang dilancarkan oleh pihak militer dengan kerja sama pihak kejaksaan dan bea cukai. Korupsi dan gaya hidup pejabat tinggi Negara dan perwira militer yang tidak memperhatikan nasib rakyat dan anak buahnya menjadi alat bagi PKI untuk mengkampanyekan ganyang 3 Setan Kota termasuk para pejabat yang disebutkan sebagai

---

<sup>31</sup> Sulastomo, *op.cit.*, hlm. 18.

kaum kapitalis birokrat. Dengan demikian PKI semakin mendapat tempat di hati rakyat yang sudah lelah menghadapi kesulitan hidup.<sup>32</sup>

### 3. Sosial Budaya

Ditengah perekonomian yang terus memburuk, pemerintah tetap melaksanakan pembangunan-pembangunan fasilitas dengan maksud mempertontonkan kekuatan dan kejayaan Indonesia di mata internasional dalam menentang neo kolonialisme dan imperialisme. Tanggal 17 Agustus 1961, presiden memancang tiang pertama pembangunan Tugu Nasional yang terletak ditengah lapangan Merdeka yang direncanakan akan menjulang setinggi 127 meter dan memakan biaya setengah milyar rupiah. Menurut presiden, tugu ini akan menjadi tanda pusat bangsa Indonesia yang kuat, besar dan sentosa. Berikutnya tanggal 25 Agustus 1961 dilangsungkan upacara pemancangan tiang pertama Masjid Istiqlal yang diperkirakan akan menjadi Masjid terbesar di Asia Tenggara bahkan dunia. Rencana selanjutnya di Jalan Merdeka Utara akan dibangun gedung-gedung khusus untuk kesenian seperti teater dan museum. Jalan Merdeka Timur akan dipergunakan khusus untuk gedung kementerian. Sekitar akhir tahun 1964, saat muncul wacana untuk keluar dari PBB, presiden juga membangun markas besar dunia ketiga (pusat *The New*

---

<sup>32</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 284-285.

*Emerging Forces*) di Jakarta, menyaingi markas besar PBB di New York, yang kemudian hari menjadi gedung MPR/DPR.<sup>33</sup>

Penderitaan rakyat terus bertambah, di pihak lain orang tetap bernafsu mengimpor mobil-mobil dengan menggunakan Izin Istimewa Devisa. Sampai akhir tahun 1962, akan masuk 8.000 unit mobil sedan, 500 unit mobil Impala, dan 600 unit Volkswagen. Pemerintah kabarnya akan memperoleh komisi Rp 1 milyar atas impor mobil-mobil tersebut untuk pembangunan Masjid Istiqlal.<sup>34</sup> Kebijakan pemerintah harus turut bertanggung jawab atas keadaan ini. Di saat sebagian besar rakyat menderita akibat kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok, di lain pihak segelintir orang yang memiliki banyak uang terus membeli barang-barang mewah. Inilah sebagian dari gambaran ketimpangan sosial yang terjadi pada masa itu.

Dalam bidang pendidikan, tahun 1961 dalam rapat kerja dengan Komisi J (PP & K) DPRGR membahas RUU tentang wajib kerja, Menteri PP & K Prijono yang mengatur bidang keilmuan di perguruan tinggi menyatakan bahwa ilmu sosial, ekonomi, dan humaniora kecuali bahasa dilarang mengadakan afiliasi dengan negara-negara kapitalis, tetapi diperkenankan dengan negara sosialis. Untuk ilmu eksakta, afiliasi dengan negara mana saja diperkenankan. Selain itu literatur ilmu-ilmu sosial,

---

<sup>33</sup> Sulastomo, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>34</sup> Rosihan Anwar, *op.cit.*, hlm. 157.

ekonomi, dan filsafat dianjurkan menggunakan buku-buku sosialis. Hal ini untuk mencegah bahaya subversi mental di kalangan mahasiswa.

Selain di bidang pendidikan, upaya mencegah bahaya subversi asing juga mencuat di bidang budaya. Tanggal 17 Agustus 1963, dideklarasikan Manifestasi Kebudayaan (Manikebu) oleh 13 seniman di Jakarta, yaitu H. B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Sukito, Zaini, Bokor Hutasuhut, Gunawan Mohammad, A. Bastari Asnin, Soe Hok Djin, Ras Siregar, Bur Rasuanto, D. S. Mulyanto, Sjahwil, dan Djufri Tanissan. Manikebu menyatakan pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional yang berfalsafah Pancasila dan tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Hal ini dianggap tidak mencerminkan sikap yang progresif revolusioner di masa revolusi saat itu. Manikebu menjadi kelompok budayawan yang berseberangan dengan pemikiran Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi pada komunis. Menteri PP & K Prijono juga turut menyerang Manikebu dengan mempertanyakan mengapa Manikebu hanya mencantumkan Pancasila saja dan tidak menyebut Manipol. Para penyusun Manikebu menjadi bulan-bulanan serangan pribadi pihak Lekra dengan mencap Manikebu bukanlah Manipolis sejati.

Lekra memegang peranan dalam kehidupan kebudayaan saat itu. Festival Film Asia-Afrika III tanggal 18 April 1964 menjadi suatu *show* alias pertunjukan kaum komunis melalui Lekra. Film-film yang diputar di bioskop pada masa itu hanya diisi oleh film RRC, Uni Soviet, dan Vietnam

Utara. Sementara itu, pemutaran film-film AS diboikot oleh PKI. PKI menggerakkan lahirnya Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis AS (PAPFIAS). Bill Palmer, seorang pengusaha film AS, rumahnya di Gunung Mas dekat Puncak digrebek oleh massa pemuda dan kabarnya di rumah itu juga ditemukan *copy* Dokumen Gilchrist. Bill Palmer adalah kepala AMPAI (*American Motion Pictures Assosiacition in Indonesia*). Para pemuda menuntut agar AMPAI dibubarkan dan Bill Palmer diusir atau diadili karena dianggap sebagai seorang agen CIA di Indonesia.<sup>35</sup> Tanggal 18 Mei 1964, presiden mengeluarkan larangan terhadap Manikebu dengan alasan Manifesto Politik RI sebagai pancaran Pancasila telah menjadi GBHN dan tidak dapat didampingi oleh manifesto lain yang bersikap ragu-ragu terhadap revolusi. Kebudayaan harus dijalankan di atas rel revolusi menurut petunjuk Manipol.

Pelarangan terhadap Manikebu juga berbuntut dengan dikeluarkannya instruksi Menteri PP & K dalam membina kepribadian bangsa dengan melarang potongan rambut *The Beatles* (gondrong) dan disasak secara berlebihan, dalam berpakaian dilarang menjiplak mode-mode luar negeri, dan juga menghilangkan nama panggilan yang kebarat-baratan, misalnya *daddy, mom, papi, mami, mientje, fransje, mieke*, dan *wiesje*. Kebijakan ganyang kebudayaan ngak-ngik-ngok membuat lagu-lagu barat misalnya *Beatles* dilarang. Tanggal 29 Juli 1965 *Band Koes Bersaudara* di Jakarta ditahan oleh Kejaksaan Tinggi/Istimewa Jakarta

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 343.

karena membawakan lagu ala *Beatles*. Bahkan menurut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anwas, Asisten II Bidang Operasi Komdak VII/Jaya, dalam suatu razia mengatakan piringan hitam dan pita rekaman *The Beatles* paling ampuh menanamkan *Nekolim way of life* dan paling efektif memberikan didikan jahat kepada generasi muda dan anak-anak yang sedang tumbuh. Dalam razia tersebut, sejumlah 22.000 buku penetrasi kebudayaan imperialis AS, 250 piringan hitam *The Beatles*, dan buku-buku berbau Manikebu, cabul, dan merusak akhlak anak-anak muda dibakar oleh massa rakyat revolusioner yang menyanyikan lagu “Hancurkanlah musuh kita Inggris dan AS”. Kebudayaan yang asalnya dari Barat, termasuk AS dan Inggris dilarang dan dianggap tidak cocok dengan budaya timur yang ada di Indonesia.<sup>36</sup>

Menjelang peristiwa 30 September 1965, dalam surat kabar Bintang Timur yang dimiliki oleh Lekra banyak mengangkat tulisan yang mengindikasikan akan adanya peristiwa besar dan penuh profokasi terhadap massa. Misalnya sajak yang dimuat dalam surat kabar tersebut tanggal 21 Maret 1965 yang berjudul “Kunanti Bumi yang Memerah Darah” tulisan Mawie.<sup>37</sup> Sajak ini menggambarkan tidak lama lagi bumi akan bersimbah darah dan Sungai Ciliwung akan merah airnya, namun penantian terhadap kejadian mengerikan yang akan terjadi itu terasa gembira dan tak ada rasa ketakutan. Dalam lembaran “Lentera” surat kabar

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 314.

<sup>37</sup> Sulastomo, *op.cit.*, hlm. 22.

Bintang Timur tanggal 9 Mei 1965, Pramudya Ananta Toer, seorang tokoh Lekra, menulis naskah berjudul “Tahun 1965 Tahun Pembabatan Total”.<sup>38</sup> Apapun arti dan maksud tulisan-tulisan ini, terbukti dengan munculnya Gerakan 30 September 1965 yang diawali dengan pembunuhan jenderal Angkatan Darat dan dibalas dengan pembantaian besar-besaran terhadap kaum komunis di Indonesia.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 23.